

## **ABSTRAK**

Perkara No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG adalah gugatan perdata yang dilakukan oleh CV. Hutama Mandiri Jaya selaku Penggugat terhadap PT. Indomarco selaku Tergugat I dan Ahli waris dari mantan direktur CV. Hutama Mandiri Jaya selaku Tergugat II. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh surplus kas yang tidak dibayar oleh Tergugat I, menyatakan bahwa akta perubahan CV Hutama Mandiri Jaya adalah sah, dan menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak persero atas CV. Hutama Mandiri Jaya. Dari gugatan yang diajukan penggugat, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya. Melihat ada keganjilan atau kekurangan dalam menjatuhkan putusan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan dalam memutuskan perkara gugatan perdata No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG dan untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan tersebut.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder, dengan cara studi kasus. Ruang lingkup penelitian normatif disini meliputi penelitian tentang asas hukum. Dengan mempelajari dan menelaah secara teliti putusan No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG.

Pertimbangan hakim dilihat dari asas kepastian dan kemanfaatan dalam perkara No, 204/PDT.G/2021/PN.BDG sudah tepat karena sesuai dengan defenisi dan nilai-nilai yang terkandung didalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan dalam perkara No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG adalah kurang tepat karena hakim dianggap tidak memperhatikan keadilan dalam pembagian surpus antara Penggugat I dan Tergugat II. Akibat hukumnya Penggugat tidak mendapatkan surplus yang merupakan haknya dan akta perubahan CV yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Gugatan Perdata, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum

## **ABSTRACT**

Case Number 204/PDT.G/2021/PN.BDG is a civil lawsuit filed by CV. Hutama Mandiri Jaya as the Plaintiff against PT. Indomarco as Defendant I and heirs of the former director of CV. Hutama Mandiri Jaya as Defendant II. This lawsuit aims to obtain a cash surplus that was not paid by Defendant I, stating that the deed of amendment to CV Hutama Mandiri Jaya is valid, and stating that Defendant II does not have any ownership rights over CV. Hutama Mandiri Jaya. From the lawsuit filed by the plaintiff, the Panel of Judges rejected the plaintiff's claim in its entirety. Seeing that there are anomalies or shortcomings in making the decision, the authors are interested in conducting research on the decision.

This study aims to determine the basis of the Court's considerations in deciding the case of civil suit no. 204/PDT.G/2021/PN.BDG and to find out the legal consequences of the default by the defendant against the plaintiff in the agreement that has been agreed by both parties. The main issue discussed in this thesis is how the judges consider in deciding the lawsuit.

The method used by the author in this study is a normative research method, namely legal research conducted by examining library materials and/or secondary data, by means of case studies. The scope of normative research here includes research on legal principles. By studying and examining carefully the decision no. 204/PDT.G/2021/PN.BDG.

The judge's consideration seen from the principle of certainty and expediency in case No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG is correct because it is in accordance with the definitions and values contained in the principle of certainty and the principle of expediency. The judge's consideration is seen from the principle of justice in case no. 204/PDT.G/2021/PN.BDG is not appropriate because the judge is considered not to pay attention to justice in the distribution of surplus between Plaintiff I and Defendant II. As a result, the Plaintiff did not get the surplus which was his right and the deed of amendment to the CV submitted by the Plaintiff did not have permanent legal force.

**Keyword:** Civil Lawsuits, Judges' Considerations, Legal Consequences